

Id : 16292

Call Number : 342 SUD K

Judul : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jatim tentang Pelarangan aktivitas jemaat ahmadiyah Indonesia menurut peraturan perundang-undangan (contoh kasus SK Gubernur Jatim Nomor 188/94/KPTS/013/2011) / oleh Iman Sudrajat

Pengarang : SUDRAJAT, IMAN

Nim : 205060193

Kota : Jakarta

Tahun Terbit : 2011

Deskripsi Fisik : vii, 89 hal. lamp. 27 cm

Pembimbing : 1.Abudan, Muhammad

Bidang : 1.Hukum

Subjek : 1.PERUNDANG-UNDANGAN

Abstrak : abstrak (A) Nama : Iman Sudrajat; NIM: 205060193 (B) Judul Skripsi : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jatim Tentang Pelarangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia Menurut Peraturan Perundang-Undangan Contoh Kasus SK Gubernur Jatim Nomor 188/94/KPTS/013/2011). (C) Halaman : vii + 89 + 5 daftar pustaka + 2011 (D) Kata Kunci : SK Gubernur Jatim, Peraturan Perundang-Undangan (E) Isi : Sejak terjadinya kerusuhan di Cikeusik Pandeglang Banten, banyak pemerintah daerah di Indonesia mengeluarkan SK melarang aktivitas Jemaat Ahmadiyah, salah satunya adalah Provinsi Jawa Timur dengan dikeluarkannya SK Nomor 88/94/ KPTS/013/2011 yang pada pokoknya meminta agar menetapkan larangan aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)di Jawa Timur. Larangan itu cukup beralasan karena pertentangan antara Ahmadiyah dengan umat Islam Jawa Timur dapat mem-bahayakan ketertiban dan keamanan wilayah di Jawa Timur. Keluarnya SK tersebut juga tidak lepas dari pro dan kon-tra, bahkan beberapa kalangan banyak mempertanyakan keabsahan dari SK tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah SK Gubernur Jatim Nomor 4/KPTS/013/2011 mempunyai legalitas menurut peraturan perundang-undangan? Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu metode penelitian hukum normatif dengan didukung wawancara. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa SK Gubernur Jatim Nomor 188/94/KPTS/013/2011 pembentukannya

didasarkan pada Undang-Undang UU)Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(PPP)selanjutnya disingkat (UU PPP) yaitu telah melibatkan unsur-unsur sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1 angka 7 UU PPP yaitu dukungan dari DPRD Jawa Timur yang disahkan oleh Gubernur, untuk menga-tasi keadaan konflik sejalan dengan Pasal 38 Ayat (2) huruf a UU PPP yang menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu,DPRD Provinsi atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi diluar Prolegda Provinsi untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam. Dari segi lingkup materi yang diatur SKB ini juga sejalan dengan SKB Tiga Menteri. Meskipun SK Gubernur Jatim tersebut sejalan dengan SKB 3 Menteri, namun kewenangannya dinilai telah melampaui karena masalah urusan agama adalah urusan Pemerintah Pusat sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa yang menjadi urusan Pemerintah Pusat adalah politik luar negeri, pertahanan, keamanan,yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama. SK Gubernur Jatim yang sudah terlanjur dibentuk tentang pelarangan aktivitas Jemaat Ahmadiyah harus segera di-review dan disesuaikan sesuai dengan mekanisme dalam UU PPP. (F) Daftar acuan : 55 (1945-2011) (G) Dosen Pembimbing : Muhammad Abudan, S.H., M.H. (H) Penulis : Iman Sudrajat